

Struktur Ketenagakerjaan Dan Partisipasi Angkatan Kerja Di Pedesaan Indonesia: Analisis Hasil Sakernas 2006

Nugraha Setiawan^{*)}

Abstract

The study is aimed at analyzing labor structure in rural area, by carrying out study on working age population, labor force, and labor force participation rate. Secondary data analysis approach was used in this study. The data form Sakernas (National Labor Force Survey) 2006 was analyzed by a descriptive statistical analysis. The result of the study showed that proportion of working age population and labor force in rural area it was more younger and lower education than urban area. However, if we take look at rural labor force participation rate was more higher than urban area, in the all of age and education attainment groups.

Key Words: age, education, labor force, labor force participation rate, rural.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan mengkaji struktur ketenagakerjaan di pedesaan yang dirinci atas aspek tenaga kerja, angkatan kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Metode studi yang digunakan adalah model pendekatan analisis data sekunder, melalui pemahaman data ketenagakerjaan dengan memakai teknik analisis statistika deskriptif terhadap data dasar yang berasal dari hasil Survey Angkatan Kerja Nasional 2006. Hasil kajian menunjukkan, tenaga kerja dan angkatan kerja di pedesaan umumnya terdiri atas tenaga kerja muda dengan tingkat pendidikan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan di perkotaan, namun demikian tingkat partisipasi angkatan kerja di pedesaan angkanya lebih tinggi jika dibandingkan dengan perkotaan pada semua kelompok umur dan tingkat pendidikan.

Kata Kunci: umur, pendidikan, angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, pedesaan.

^{*)} Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan dan pengajar pada Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Peternakan Unpad.

Pendahuluan

Di pedesaan Indonesia kesempatan kerja semakin sulit, bahkan di pedesaan pulau Jawa, sulitnya kesempatan kerja tersebut telah dirasakan sejak awal tahun tujuh puluhan akibat terjadinya fragmentasi lahan pertanian. Semakin sempitnya lahan pertanian, menurut Manning (1987) telah menyebabkan terjadinya perubahan struktur lapangan pekerjaan di pedesaan yang mengarah ke sektor non pertanian.

Walaupun telah terjadi perubahan struktur lapangan pekerjaan di wilayah pedesaan, Hayami (1988) melihat, kontribusi lapangan pekerjaan di pedesaan terhadap total kesempatan kerja khususnya di sektor perdagangan dan industri ternyata terus berkurang. Kondisi ini menyebabkan banyak penduduk pedesaan yang mencari kerja di luar desanya terutama di perkotaan, sehingga menimbulkan masalah baru, yaitu derasnya arus mobilitas penduduk dari wilayah desa ke perkotaan.

Selain masalah struktur lapangan pekerjaan, permasalahan ketenagakerjaan lain yang dihadapi pedesaan, paling tidak berkaitan dengan dua aspek, yaitu berkaitan dengan struktur umur dan struktur tingkat pendidikan tenaga kerja dan angkatan kerja. Pedesaan, dihadapkan pada kondisi makin berkurangnya angkatan kerja produktif, akibat banyaknya pencari kerja usia muda yang mencoba mengadu nasib di wilayah perkotaan. Selain itu, dihadapkan pula pada keadaan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari struktur pendidikan yang masih rendah jika dibandingkan dengan tenaga kerja maupun angkatan kerja perkotaan.

Walaupun demikian, kondisi ketenagakerjaan di pedesaan saat ini mungkin saja sudah mulai mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Beberapa hasil survey terakhir telah

mengindikasikan adanya perubahan-perubahan tersebut. Misalnya, dilihat dari struktur pendidikan, angkatan kerja pedesaan telah mengalami perbaikan. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan kondisi ketenagakerjaan di daerah perkotaan, terlihat masih adanya beberapa permasalahan yang perlu dibenahi, baik untuk meningkatkan kualitas tenaga kerjanya maupun memperluas kesempatan kerja.

Berdasarkan uraian di atas, sangatlah menarik untuk mengkaji kondisi ketenagakerjaan yang aktual di wilayah pedesaan. Adapun tujuannya adalah untuk mempelajari struktur ketenagakerjaan pedesaan, yang dirinci atas aspek tenaga kerja, angkatan kerja, serta tingkat partisipasi angkatan kerja yang didasarkan pada struktur kelompok umur dan tingkat pendidikan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah model pendekatan analisis deskriptif terhadap data sekunder. Sumber data utamanya berasal dari hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2006 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Data yang dipakai adalah data tenaga kerja atau usia kerja dan angkatan kerja menurut kelompok umur dan tingkat pendidikan yang ditamatkan, yang dibedakan berdasarkan wilayah pedesaan dan perkotaan. Sementara itu, untuk memperoleh data TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) dilakukan pengukuran melalui teknik perhitungan ketenagakerjaan yang sudah lazim digunakan.

Analisis data untuk mengkaji struktur tenaga kerja dan angkatan kerja di pedesaan, baik berdasarkan kelompok umur maupun tingkat pendidikan, dilakukan dengan analisis statistik deskriptif yang ditampilkan dalam bentuk tabel silang, kemudian

dilakukan komparasi antara pedesaan dan perkotaan maupun terhadap struktur ketenagakerjaan secara nasional. Sedangkan untuk mengukur TPAK dilakukan dengan cara membagi jumlah absolut tenaga kerja dengan angkatan kerja dikalikan seratus, dan untuk memudahkan analisis hasil pengukuran tersebut ditampilkan dalam bentuk grafik.

Operasionalisasi variabel yang dikaji, didasarkan pada definisi *Labour Force Concept* yang direkomendasikan oleh *International Labor Organization*, yaitu: (1) Tenaga kerja (*labor*), adalah seluruh penduduk yang telah berumur 15 tahun ke atas, tanpa menggunakan batas atas usia kerja, diukur dalam jumlah absolut dan persentase. (2) Angkatan kerja (*labor force*), adalah tenaga kerja yang sedang bekerja dan atau sedang berusaha mencari pekerjaan, diukur dalam jumlah absolut dan persentase. (3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, diukur dengan cara menghitung jumlah absolut angkatan kerja dibagi dengan tenaga kerja kerja kemudian dikalikan seratus.

Hasil dan Pembahasan

Struktur Umur dan Pendidikan Tenaga Kerja

Data yang tercantum pada Tabel 1 memperlihatkan, proporsi tenaga kerja yang berada di pedesaan (55,98 persen), lebih tinggi dibandingkan dengan yang berada di perkotaan (44,02 persen). Hal ini mudah dimengerti, sebab jumlah penduduk pedesaan masih jauh lebih banyak dari pada penduduk perkotaan. Kecenderungan perkembangan beberapa variabel demografi mendukung argumen di atas. Sampai saat ini fertilitas penduduk di wilayah pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Walaupun tingkat mortalitas pedesaan juga lebih tinggi, juga adanya kecenderungan penduduk pedesaan yang melakukan migrasi ke perkotaan lebih banyak dari pada yang berasal dari kota masuk ke pedesaan (Saefullah, 2002), namun belum berpengaruh signifikan terhadap penurunan laju pertumbuhan penduduk pedesaan.

Tabel 1
Tenaga Kerja Menurut Kelompok Umur
di Pedesaan dan Perkotaan Indonesia 2006

Kelompok Umur	Pedesaan	Perkotaan	Pedesaan+Perkotaan
15 - 24	22.819.468 (25,59)	19.647.956 (28,03)	42.467.424 (26,67)
25 - 34	20.778.021 (23,31)	17.371.054 (24,78)	38.149.075 (23,95)
35 - 44	18.194.830 (20,41)	14.462.884 (20,63)	32.657.714 (20,51)
45 - 54	12.892.512 (14,46)	9.729.515 (13,88)	22.622.027 (14,20)
55+	14.471.741 (16,23)	8.889.699 (12,68)	23.361.440 (14,67)
Total	89.156.572 (100,00) [55,98]*	70.101.108 (100,00) [44,02]*	159.257.680 (100,00) [100,00]*

Sumber: Hasil Survey Angkatan Kerja Nasional 2006, diolah penulis.

Keterangan: Angka dalam kurung adalah persentase kolom, angka dalam kurung bertanda asterik adalah persentase baris.

Jika mencermati lebih jauh Tabel 1 tersebut, nampak bahwa tenaga kerja berusia 15-34 tahun di daerah pedesaan (48,90 persen) proporsinya lebih sedikit dibandingkan dengan di perkotaan (52,81 persen). Kondisi sebaliknya terlihat pada usia tenaga kerja 35 tahun ke atas, tenaga kerja pedesaan pada kelompok umur ini (51,10 persen) ternyata persentasenya lebih banyak dari di perkotaan (47,19 persen).

Fenomena di atas dapat diterangkan sebagai berikut. Pada waktu masih muda penduduk pedesaan cenderung lebih banyak yang bermigrasi ke luar wilayahnya. Penduduk usia muda yang masih dalam masa sekolah memilih melanjutkan sekolah di daerah lain terutama di kota untuk menggapai pendidikan yang lebih tinggi. Mereka yang terjun ke dunia kerja, lebih senang mengadu nasib untuk mencari pekerjaan dan bekerja di kota, dengan harapan akan mendapat kehidupan yang lebih baik. Namun ada kecenderungan pula, semakin bertambah usia mereka, sesudah tidak bisa terlalu produktif bekerja di kota, mereka kembali ke desanya masing-masing (Setiawan, 1998).

Makna umum yang tercermin dari data yang terdapat pada Tabel 1 adalah, bahwa potensi sumber daya manusia di pedesaan jika dilihat dari aspek produktivitas ternyata tidak lebih bagus dibandingkan dengan di perkotaan. Lebih tingginya proporsi tenaga kerja yang berusia lebih tua dibandingkan dengan kelompok umur muda di pedesaan mengindikasikan hal di atas. Akan tetapi, perlu dikaji lebih jauh, bagaimana struktur angkatan kerjanya, sebab tidak semua tenaga kerja memasuki dunia kerja.

Selain umur, variabel yang juga penting untuk dikaji dalam ketenagakerjaan adalah pendidikan. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas tenaga kerja. Idealnya, tenaga kerja yang tersedia di suatu negara memiliki pendidikan yang memadai sesuai dengan kesempatan kerja yang tersedia, namun di negara-negara yang dalam kondisi masih sedang berkembang biasanya sering terjadi *mismatch* antara pendidikan dan pekerjaan yang ditekuninya. Struktur tingkat pendidikan tenaga kerja, sering diukur dengan proporsi tenaga kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Data yang tersaji dalam Tabel 2. merupakan struktur tingkat pendidikan tenaga kerja yang dibedakan berdasarkan daerah pedesaan dan perkotaan.

Dari Tabel 2 nampak, tenaga kerja pedesaan lebih banyak didominasi oleh mereka yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal atau tidak sekolah, yang tidak tamat SD, dan mereka yang hanya mengantongi ijazah SD (66,38 persen). Sementara tenaga kerja yang berpendidikan SMTP ke atas proporsinya lebih banyak berdomisili di perkotaan (63,81 persen). Hal ini, barangkali berkaitan dengan lebih banyaknya fasilitas pendidikan formal di kota dibandingkan dengan di pedesaan.

Selain itu, bisa juga karena masyarakat pedesaan belum begitu mamahami arti penting pendidikan bagi masa depan anak-anaknya. Faktor lain, dan ini mungkin faktor yang paling menentukan, karena biaya untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi relatif mahal, sementara sebagian besar masyarakat di pedesaan masih banyak yang tergolong miskin (BPS, 2003).

Tabel 2
Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
di Pedesaan dan Perkotaan Indonesia 2006

Tk. Pendidikan	Pedesaan	Perkotaan	Pedesaan+Perkotaan
< SD	59.179.214 (66,38)	25.367.633 (36,19)	84.546.847 (53,09)
SMTP	19.639.285 (22,03)	17.942.957 (25,60)	37.582.242 (23,60)
SMTA	8.922.590 (10,01)	21.339.849 (30,44)	30.262.429 (19,00)
Diploma/Akd	792.213 (0,89)	2.139.661 (3,05)	2.934.288 (1,84)
Universitas	623.280 (0,70)	3.311.008 (4,72)	3.934.288 (2,47)
Total	89.156.572 (100,00) [55,98]*	70.101.108 (100,00) [44,02]*	159.257.680 (100,00) [100,00]*

Sumber: Hasil Survey Angkatan Kerja Nasional 2006, diolah penulis.

Keterangan: Angka dalam kurung adalah persentase kolom, angka dalam kurung bertanda asterik adalah persentase baris.

Di pedesaan proporsi tenaga kerja berpendidikan SD adalah yang terbanyak, demikian juga di perkotaan walaupun persentase lebih kecil jika dibandingkan dengan di wilayah pedesaan. Sementara itu, tenaga kerja di pedesaan dengan kualifikasi pendidikan SMTP (22,03 persen), juga sudah lumayan banyak, bahkan proporsinya tidak terpaut terlalu jauh dari tenaga kerja berpendidikan SMTP perkotaan (25,60 persen).

Mungkin ini merupakan hasil yang sudah mulai bisa dipetik dengan banyaknya pembukaan SMTP di wilayah pedesaan, sehingga para lulusan SD yang ingin melanjutkan ke SMTP tidak perlu lagi pergi ke kota. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan menjadi tidak terlampaui mahal, dan secara ekonomi menjadi terjangkau oleh orang tua di pedesaan yang menginginkan anaknya meraih pendidikan yang lebih baik.

Walaupun struktur pendidikan tenaga kerja pedesaan ini nampak sudah mulai membaik, namun jika melihat mereka yang berkualifikasi pendidikan SMTA, tingkat diploma atau dahulu sama dengan tingkat akademi, serta mereka yang telah meraih pendidikan sarjana, angkanya masih terlihat jomplang dibandingkan terhadap tenaga kerja yang ada di perkotaan. Misalnya tenaga kerja pedesaan yang berpendidikan SMTA (10,01 persen) proporsinya hanya sekitar sepertiga dari tenaga kerja berpendidikan sama di perkotaan (30,44 persen). Apalagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan sarjana, proporsi tenaga kerja pedesaan (0,70 persen) jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan mereka yang ada di perkotaan (4,72 persen).

Semua uraian di atas mengisyaratkan, walaupun telah ada perbaikan struktur pendidikan tenaga kerja

pedesaan, akan tetapi masih perlu upaya-upaya lebih intensif untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Mengingat umumnya masyarakat pedesaan masih terjerat kemiskinan, maka kebijakan pendidikan gratis, atau paling tidak kebijakan pendidikan yang murah tapi berkualitas, serta dapat terjangkau oleh hampir semua lapisan masyarakat di pedesaan sangat perlu untuk segera diupayakan.

Struktur Umur dan Pendidikan Angkatan Kerja

Berdasarkan *labor force concept*, tenaga kerja bisa dikelompokkan lagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Termasuk bukan angkatan kerja antara lain tenaga kerja yang sebagian besar waktunya digunakan untuk mengurus rumah tangga, sekolah, serta para pensiunan dan orang yang cacat fisik sehingga

tidak dapat melakukan suatu pekerjaan. Sementara yang termasuk angkatan kerja adalah tenaga kerja yang sedang bekerja atau sedang berusaha mencari pekerjaan.

Tabel 3 memberikan gambaran mengenai struktur umur angkatan kerja Indonesia di daerah pedesaan maupun perkotaan. Secara umum, proporsi angkatan kerja pedesaan (58,87 persen) lebih banyak daripada angkatan kerja perkotaan (41,13 persen). Keadaan seperti ini sejalan dengan struktur tenaga kerja, hanya saja rasio angkatan kerja pedesaan terhadap perkotaan angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan rasio tenaga kerja pedesaan. Fenomena ini mengindikasikan, bahwa secara umum tenaga kerja yang tinggal di pedesaan lebih banyak yang memasuki aktivitas ekonomi (angkatan kerja) dibandingkan dengan di daerah perkotaan.

Tabel 3
Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur
di Pedesaan dan Perkotaan Indonesia 2006

Kelompok Umur	Pedesaan	Perkotaan	Pedesaan+Perkotaan
15 – 24	13.221.513 (21,13)	9.232.567 (21,12)	22.454.080 (21,13)
25 – 34	15.295.427 (24,44)	12.324.866 (28,20)	27.620.293 (25,99)
35 – 44	14.622.014 (23,37)	10.636.787 (24,34)	25.258.801 (23,77)
45 – 54	10.445.457 (16,69)	7.281.717 (16,66)	17.727.174 (16,68)
55+	8.988.305 (14,36)	4.233.142 (9,68)	13.221.447 (12,44)
Total	62.572.716 (100,00) [58,87]*	43.709.079 (100,00) [41,13]*	106.281.795 (100,00) [100,00]*

Sumber: Hasil Survey Angkatan Kerja Nasional 2006, diolah penulis.

Keterangan: Angka dalam kurung adalah persentase kolom, angka dalam kurung bertanda asterik adalah persentase baris.

Dilihat dari struktur umur, angkatan kerja pedesaan usia muda hingga 34 tahun (45,57 persen), ternyata proporsinya lebih rendah dibandingkan dengan di perkotaan (49,32 persen). Hal ini memperkuat dugaan, bahwa tenaga kerja yang tergolong angkatan kerja banyak yang mencoba mengadu nasib untuk mendapatkan pekerjaan di perkotaan. Sementara itu, angkatan kerja 15-24 tahun yang proporsinya hampir sama antara pedesaan dan perkotaan, kemungkinan agak enggan pergi ke kota sehubungan pendidikan mereka yang kurang memadai, dan sudah memperhitungkan tidak akan kuat bersaing untuk mendapatkan pekerjaan di kota.

Selanjutnya Tabel 3 juga memperlihatkan, proporsi angkatan kerja yang berusia 35 tahun ke atas (54,43 persen) lebih banyak yang tinggal di pedesaan

daripada di perkotaan (50,68 persen). Pada usia tersebut mungkin mereka yang berstatus sebagai migran pekerja di kota sudah merasa tidak bisa produktif lagi, sehingga lebih memilih pulang ke desa. Bisa pula mereka merasa telah cukup mencari bekal hidup dengan bekerja banting tulang di kota, dan setelah tua tinggal menikmati remitan di desa yang mereka tabungkan sebelumnya, agar dapat dinikmati pada masa tuanya.

Data yang tersaji dalam Tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan angkatan kerja di pedesaan nampak lebih rendah dibandingkan dengan di perkotaan. Di pedesaan ada kecenderungan mengelompok pada tingkat pendidikan SD (66,50 persen). Sementara itu di daerah perkotaan proporsi terbanyak berada pada tingkat pendidikan SMTA (34,18 persen).

Tabel 4
Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
di Pedesaan dan Perkotaan Indonesia 2006

Tk. Pendidikan	Pedesaan	Perkotaan	Pedesaan+Perkotaan
< SD	41.609.150 (66.50)	14.860.768 (34.00)	56.469.918 (53.13)
SMTA	12.671.223 (20.25)	9.232.333 (21.12)	21.903.556 (20.61)
SMTA	6.993.350 (11.18)	14.939.393 (34.18)	21.932.743 (20.64)
Diploma/Akd	712.510 (1.14)	1.732.053 (3.96)	2.444.563 (2.30)
Universitas	586.483 (0.94)	2.944.532 (6.74)	3.531.015 (3.32)
Total	62.572.716 (100,00) [58,87]*	43.709.079 (100,00) [41,13]*	106.281.795 (100,00) [100,00]*

Sumber: Hasil Survey Angkatan Kerja Nasional 2006, diolah penulis.

Keterangan: Angka dalam kurung adalah persentase kolom, angka dalam kurung bertanda asterik adalah persentase baris.

Kalau diamati secara parsial, angkatan kerja di pedesaan yang berada pada jenjang pendidikan SD proporsinya mencapai duapertiga dari seluruh angkatan kerja di pedesaan, sementara di perkotaan menyebar pada tingkat pendidikan SD dan SMTA masing-masing sepertiga bagian dari total angkatan kerja di kota. Keadaan ini akan menjadi persoalan, manakala sektor pekerjaan pertanian di pedesaan makin berkurang, sementara sektor pekerjaan pertanian lainnya belum bisa berkembang (Manning, 1987; Hayami, 1988).

Sebetulnya, masalah ketenagakerjaan tidak melulu ada di pedesaan, di perkotaan pun masalah itu masih tetap menjadi hal yang sangat perlu diantisipasi. Struktur pendidikan angkatan kerja perkotaan, memang menunjukkan tanda yang lebih baik dibandingkan dengan pedesaan, namun rupanya tidak dibarengi dengan berkembangnya kesempatan kerja yang memadai dan sesuai dengan pendidikannya. Fenomena *mismatch* antara lapangan pekerjaan dengan kualifikasi pendidikan, merupakan hal yang lumrah ditemukan di perkotaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPAK atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah salah satu ukuran ketenagakerjaan yang banyak digunakan. Pengukuran TPAK dilakukan dengan cara menghitung jumlah absolut angkatan kerja dibagi dengan tenaga kerja atau penduduk usia kerja kemudian dikalikan 100. Jika TPAK menunjukkan angka 75, artinya terdapat 75 orang yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan setiap 100 orang tenaga kerja. Berdasarkan TPAK

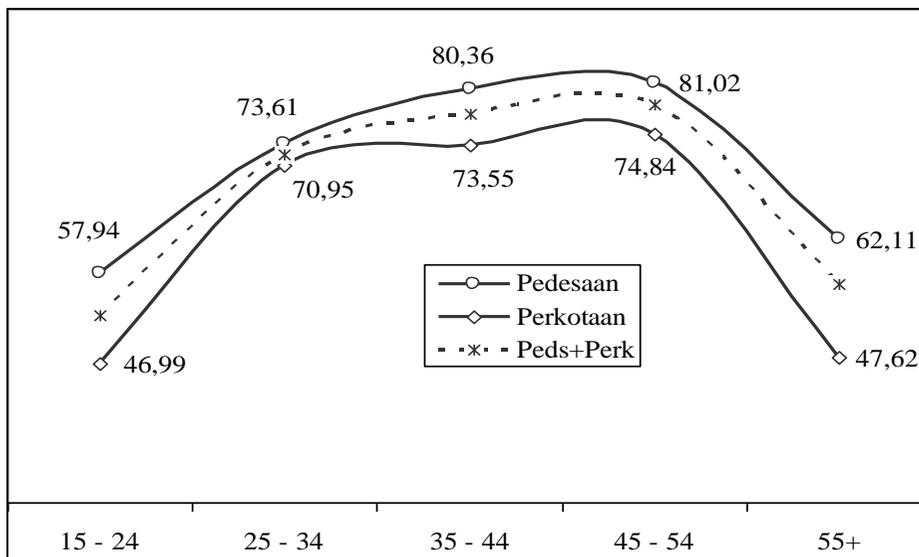
kita dapat melakukan perkiraan, berapa besar penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi.

Ilustrasi pada Gambar 1 memperlihatkan, ternyata TPAK di pedesaan jauh lebih tinggi dalam semua tingkatan umur. Keadaan seperti itu, paling tidak telah terjadi sejak lebih dari tigapuluh tahun yang lalu (Secha dan Trisilo, 1990). Hal ini merupakan bukti, tentang lebih banyaknya penduduk usia kerja di pedesaan yang memasuki dunia kerja dibandingkan dengan yang bersekolah, atau yang hanya mengurus rumah tangga serta kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya bukan kerja dan mencari pekerjaan.

Lebih tingginya TPAK pedesaan dibandingkan dengan perkotaan, paling tidak dapat ditafsirkan dari dua sisi. Pertama, dilihat dari etos kerja, mungkin masyarakat desa lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perkotaan, sehingga mereka kebanyakan bergiat dalam aktivitas ekonomi. Kedua, bisa pula mereka masuk ke dunia kerja karena terpaksa, akibat adanya himpitan kehidupan yang begitu kuat, sehingga mau tidak mau mereka harus bekerja agar dapat bertahan hidup.

Alasan yang terakhir sepertinya lebih masuk akal, sebab kalau dilihat berdasarkan struktur umur, ternyata TPAK di pedesaan lebih tinggi pada semua kelompok umur. Hal ini berarti, ada "pengerahan" tenaga kerja mulai dari pekerja yang masih muda, sudah dewasa, sampai yang telah tua, untuk selalu melakukan berbagai aktivitas ekonomi dengan cara melakukan pekerjaan dan mencari pekerjaan apa saja, yang penting dapat menghidupi dirinya serta keluarganya.

Gambar 1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur
di Pedesaan dan Perkotaan Indonesia
Berdasarkan Hasil Survey Angkatan Kerja Nasional 2006



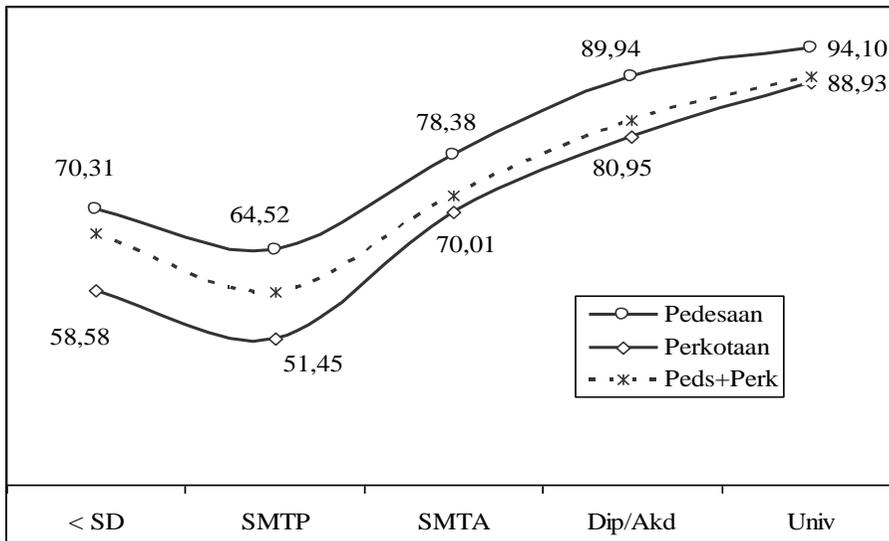
Tersirat pula adanya kecenderungan yang berbeda antara di pedesaan dan di perkotaan. Di pedesaan walaupun umur sudah beranjak tua, mereka harus tetap bekerja. Hal ini terlihat dengan makin merenggangnya garis TPAK antara di pedesaan dan perkotaan, yang mulai terjadi pada kelompok umur 35-44 tahun ke atas terutama pada kelompok umur 55 tahun ke atas. Mungkin hal ini berkaitan dengan tanggungjawab dari mereka yang sudah memiliki keluarga dan punya anak, sehingga pada umur ini harus bekerja ekstra guna membiayai sekolah anak-anaknya atau bahkan cucu-cucunya.

Seperti halnya TPAK yang didasarkan pada kelompok umur, pola TPAK yang didasarkan pada pengelompokan tingkat pendidikan, seperti nampak pada Gambar 2, juga merupa-

kan gambaran umum di Indonesia, dan telah terjadi sejak beberapa tahun ke belakang (Setiawan, 2002). Ternyata pada semua jenjang pendidikan, TPAK di pedesaan lebih tinggi dari perkotaan.

Informasi yang diperoleh dari Gambar 2 adalah rendahnya TPAK dari tingkat pendidikan SMTP, jika dibandingkan dengan kelompok tingkat pendidikan lainnya. Kondisi seperti itu, selain terjadi di pedesaan, terjadi pula di daerah perkotaan. Rendahnya TPAK di sini, bisa jadi disebabkan akibat mulai efektifnya wajib belajar 9 tahun terutama pada kategori tenaga kerja usia muda, mereka setelah selesai pendidikan SD tidak lagi memasuki angkatan kerja, tetapi meneruskan sekolahnya. Sementara itu masih tingginya TPAK yang berpendidikan SD atau lebih rendah mungkin berasal dari angkatan kerja generasi tua.

Gambar 2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Tingkat Pendidikan
di Pedesaan dan Perkotaan Indonesia
Berdasarkan Hasil Survey Angkatan Kerja Nasional 2006



Pertanyaan yang muncul adalah, apakah lebih tingginya TPAK pada pendidikan SD disebabkan masih banyaknya yang *drop out* dari SD, serta sebab lebih banyaknya lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMTP, atau karena sudah lebih banyak lulusan SMTP yang melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga banyak tenaga kerja SMTP yang tidak bisa lagi digolongkan sebagai angkatan kerja. Harapannya tentu saja jatuh pada kemungkinan yang kedua, atau lebih banyak lulusan SMTP yang melanjutkan ke SMTA, bukannya disebabkan lebih banyaknya anak SD yang tidak menamatkan pendidikannya, atau lulus SD tetapi tidak melanjutkan sekolah.

Kalau kita mengamati serta mengkaji kembali Tabel 2 dan 4, kemudian membandingkannya, akan diperoleh gambaran yang lebih jelas.

Dari kedua tabel tersebut ternyata diperoleh informasi, bahwa proporsi tenaga kerja pada kelompok SMTP lebih tinggi jika dibandingkan dengan proporsi angkatan kerja, terutama di pedesaan. Sementara itu, keadaan yang sebaliknya terjadi pada kelompok pendidikan yang belum atau tidak tamat SD serta tamat SD. Artinya, harapan di atas didukung oleh data, dan kenyataannya banyak tenaga kerja yang lulus dari SMTP melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih atas, sehingga mereka tidak tercatat sebagai angkatan kerja lulusan SMTP.

Walaupun fenomena ini merupakan preseden baik, tetapi kelihatannya tenaga kerja di Indonesia sebagian besar hanya mampu sekolah sampai tingkat SMTA, dan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Buktinya, terjadi peningkatan TPAK yang tajam dari

mulai pendidikan SMTA terutama di pedesaan. Sementara tingginya TPAK pada jenjang pendidikan tinggi, bukan berarti lebih banyak angkatan kerja yang berpendidikan perguruan tinggi. Angkanya menjadi besar, sebab jumlah tenaga kerja pada tingkat pendidikan tersebut memang hanya sedikit, dan hampir semuanya melakukan aktivitas ekonomi sehingga tercatat sebagai angkatan kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang masih mencari pekerjaan.

Satu hal lagi yang perlu dicermati, yaitu lebih tingginya TPAK pedesaan dari pada perkotaan, walaupun telah dikontrol oleh struktur umur dan tingkat pendidikan. Harapannya TPAK yang tinggi di pedesaan disebabkan oleh lebih banyaknya angkatan kerja yang telah bekerja, bukannya angkatan kerja yang masih mencari pekerjaan. Namun untuk mengetahui hal tersebut perlu dikaji lebih jauh mengenai tingkat penganggurannya.

Hasil penelusuran Setiawan (2005), terhadap struktur penganggur dan tingkat pengangguran memperlihatkan, bahwa tingkat pengangguran di pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan di daerah perkotaan. Hal tersebut berarti, secara relatif angkatan kerja di desa lebih banyak yang bekerja dibandingkan dengan yang ada di perkotaan. Jadi TPAK di desa tinggi, karena banyak disumbang oleh mereka yang telah kerja dibandingkan yang masih mencari pekerjaan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pengkajian dan hasil analisis terhadap kondisi ketenagakerjaan dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di pedesaan Indonesia, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Tenaga kerja yang bermukim di pedesaan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan di perkotaan.

Pada umumnya mereka berumur muda, yaitu antara 15-34 tahun, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Namun jika dilihat dari pendidikannya, tenaga kerja di pedesaan memiliki tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan perkotaan.

2. Angkatan kerja pedesaan pun jumlahnya lebih banyak dibandingkan perkotaan. Struktur umur dari angkatan kerja sedikit lebih tua (25-44 tahun) dibandingkan dengan tenaga kerja, kondisi tersebut hampir sama antara pedesaan dan perkotaan. Struktur pendidikan angkatan kerja pedesaan mengelompok pada tingkatan SD, sementara di kota proporsi tertinggi ada pada tingkat pendidikan SMTA.
3. Walaupun dari segi pendidikan angkatan kerja pedesaan kualitasnya di bawah perkotaan, namun kalau di lihat dari aspek partisipasi angkatan kerja, ternyata memiliki TPAK yang lebih tinggi dari perkotaan. Lebih tingginya TPAK pedesaan, terjadi pada semua kelompok umur dan seluruh tingkat pendidikan.

Saran-saran

Mengingat butir-butir kesimpulan di atas, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah, pembangunan ketenagakerjaan di pedesaan sebaiknya lebih diperhatikan, sebab di sinilah banyak bermukimnya tenaga kerja dan angkatan kerja dengan tingkat pendidikan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan di perkotaan. Sementara itu, angkatan kerja di pedesaan pun memiliki partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan, tetapi karena tingkat pendidikannya yang rendah kemungkinan lebih banyak berada pada sektor-sektor pekerjaan yang tergolong sebagai *blue collar*.

Daftar Pustaka

- Alatas, Secha dan Rudi Bambang Trisilo. 1990. "Struktur Ketenagakerjaan di Indonesia" dalam Aris Ananta (ed.), *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. LDFE-UI, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2003. *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2003*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2006*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Hayami, Yujiro. 1988. "Asian Development: A View from the Paddy Fields", *Asian Development Review*, 6(1): 50-63.
- Manning, Chris. 1987. "Penyerapan Tenaga Kerja di Pedesaan Jawa: Pelajaran Revolusi Hijau dan Bonanza Minyak, dan Prospeknya di Masa Depan", *Seminar Strategi Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta, 1-3 Oktober 1987.
- Saefullah, A. Djadja. 2002. "Socio-Cultural Impacts of Out Movement on Village of Origin", *Jurnal Kependudukan*, 4(2): 105-120.
- Setiawan, Nugraha. 1998. *Profil Kependudukan Propinsi Jawa Barat 1997*. Kantor Menteri Negara Kependudukan, Jakarta.
- Setiawan, Nugraha. 2002. "Angkatan Kerja dan Pengangguran di Pedesaan: Analisis Hasil Sakernas", *Jurnal Kependudukan* 4(1): 61-74.
- Setiawan, Nugraha. 2005. *Struktur Umur serta Tingkat Pendidikan Penganggur Baru dan Tingkat Pengangguran di Indonesia*. Pusat Penelitian Kependudukan dan SDM Unpad, Bandung.